

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini perekonomian suatu daerah memiliki tuntutan dimana pemerintah daerah harus mampu bertanggung jawab secara mandiri untuk pembangunan daerahnya. Pemberian otonomi daerah dari pusat ke daerah mampu mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk ditingkatkan sehingga program-program pembangunan dapat terlaksana ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2004 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bahwa “pendapatan asli daerah diperoleh berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan keuangan daerah tersebut mengakibatkan pemerintah daerah mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana berupa subsidi dari pemerintah pusat. Pengurangan subsidi memberikan akibat pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai program-program pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintah yang berdasar pada prinsip otonomi daerah. Oleh sebab itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan

semakin besar pula jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah.

Hal ini menjadi konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah kabupaten atau kota supaya mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya. Oleh sebab itu daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Berikut ini adalah tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat 2015-2019

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
PENDAPATAN	17.668.412.091	18.812.959.845	19.622.175.672	19.999.580.000	21.885.951.020
Pendapatan Asli Daerah	1.576.555.593	1.683.226.171	1.922.479.948	2.320.940.000	2.591.390.120
Dana Perimbangan	12.732.290.100	15.407.122.288	15.736.035.236	15.294.373.202	16.347.654.109
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.359.566.397	1.722.611.386	1.963.660.487	2.470.402.432	3.019.683.201
Persentase PAD terhadap PENDAPATAN (%)	8,92 %	8,94%	9,79%	11,60%	11,84%
Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan (%)	12,38%	10,92%	12,22%	15,17%	15,85%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Melihat pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Sehingga memberikan dampak yang baik bagi daerah. Sebab pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Untuk itu supaya berjalannya kinerja didalam daerah tersebut maka

Pendapatan Asli Daerah harus lebih besar, yang nantinya berdampak kepada kinerja pemerintahnya secara maksimal. Tetapi masalah yang terjadi di Sumatera Barat sendiri bahwasanya Pendapatan Asli Daerah ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan, oleh sebab itu muncul suatu masalah yang nantinya bisa menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dalam melakukan kontribusi di daerah. Sehingga fenomena yang muncul dari segi keuangan adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri. Oleh karena itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah Sumatera Barat harus berupaya meningkatkan sumber pendapatannya dari sektor pariwisata, sebab Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki aneka ragam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Sehingga nantinya bisa mendorong Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Dilihat pada Tabel 1.1 bahwasanya persentase Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2015 sebesar 12,38%, ditahun 2016 persentasenya sebesar 10,92%, sedangkan ditahun 2017 persentase PAD sebesar 12,22%, dan pada tahun 2018 sampai 2019 persentasenya sebesar 15,17% dan 15,85%. Hal ini menandakan adanya peningkatan sebesar 0,68% dari tahun 2018 ke 2019 dalam Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan, dan peningkatan ini sangat dipengaruhi dari sektor pariwisata itu sendiri.

Untuk meningkatkan kinerja atau peranan di setiap Kabupaten/Kota sangat bergantung dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Jika Pendapatan Asli Daerah nya besar, maka kontribusi di daerah tersebut makin lancar dan maksimal kinerjanya. Oleh karena itu, untuk menambah peningkatan pada Pendapatan Asli

Daerah, maka pemerintah harus lebih mampu atau mandiri untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada dan menggali potensi yang tujuannya memaksimalkan sektor pariwisata ini, yang dilihat dari jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi, jumlah tingkat penghunian kamar dan jumlah rata-rata lama tamu menginap. Sehingga dengan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya dalam pembiayaan tetapi juga terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sebab semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi wisata alam yang sangat luas dan kaya dengan sumber daya alamnya, sehingga akan berdampak dan menyokong pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan yang tujuannya untuk pembiayaan didalam daerah itu sendiri dilakukan dengan cara menggali potensi sumber daya alamnya, yang mana ini sangat berarti sebagai sumber penerimaan daerah dan juga mendorong investor, agar daerah meningkatkan sektor swasta sehingga pendapatan masyarakat bisa bertambah, jika pendapatan masyarakat bertambah berarti ada sebagian hasil pendapatannya bisa ditabung dan dari hasil tabungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Penelitian ini berfokus pada sektor pariwisata yang meliputi jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi, jumlah tingkat penghunian kamar. Selain dari sumber pendapatan daerah, sektor pariwisata juga memberikan dukungan dan kontribusi di bidang perekonomian di suatu wilayah atau daerah, sektor ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal (Nurman, 2015). Pemerintah daerah memiliki dua sumber daya keuangan yaitu, pendapatan asli daerah dan subsidi pemerintah pusat. Subsidi pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum di Indonesia. Sementara itu pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah PAD dihasilkan dari beberapa sumber yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain dari PAD yang sah (Bahar, 2009).

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi penting untuk pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Indonesia adalah dari sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata akan meningkatkan penerimaan daerah dimana kepariwisataan memiliki komponen terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak. Menurut Badrudin (2001), bahwa pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui beragam retribusi resmi yang bersifat multisektoral yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, profesional convention organizer, transportasi, dan lain-lain. Selain itu menurut Spillane (1987), bahwa pariwisata memiliki peranan dalam pembangunan negara dari tiga sisi, yaitu segi

ekonomis (sumber devisa dan pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan-wisatawan asing).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Jenis wisata beraneka ragam dimana adanya wisata alam seperti kawasan wisata terpadu kota Padang dan kawasan wisata Mandeh di kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan wilayah Bukittinggi ada kawasan wisata Jam Gadang, Pasar Atas dan Bukittinggi yang dikenal dengan Kota Pusaka dan *Geopark*. Dengan kata lain sektor pariwisata bisa menyokong Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kontribusi didalam daerah itu sendiri dan ada beberapa aspek dari sektor pariwisata yang dilihat dan nantinya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, seperti dari jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi, dan jumlah tingkat penghunian kamar. Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat, hal ini akan memberikan dampak yang baik dan sangat erat kaitannya dengan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sebab kenaikan jumlah wisatawan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor sosial dan ekonomi. Dan juga selain memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, kunjungan wisatawan juga memberikan pemasukan devisa lewat wisatawan asing, dan lain-lain sehingga peningkatan fasilitas dimanfaatkan dengan baik.

Majunya sektor pariwisata di suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan

mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi daerah tujuan wisata terutama sebagai sumber pendapatan.

Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*tourist Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *final demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang dan bahan baku untuk memproduksi guna memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan tersebut diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan ataupun restoran dan lain-lain.

Dari Jumlah Hotel dan Akomodasi juga dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya peningkatan terhadap jumlah wisatawan yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan tempat menginap semakin besar. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Hotel dan Akomodasi sangat erat kaitannya, karna dengan banyak Jumlah Hotel dan Akomodasi yang digunakan, maka semakin besar juga Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan baik itu melalui pajak hotel ataupun pajak restoran. Sehingga pemerintah dapat membangun infrastruktur untuk lebih memajukan perekonomian daerah.

Di mana hal tersebut akan menggambarkan situasi perekonomian yang bagus di mana setiap perjalanan objek wisata tentu akan menguntungkan bagi sisi perekonomian dari suatu daerah yang dikunjungi. Dan juga besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dilihat dari Jumlah Tingkat Penghunian Kamar, karna hal

ini mempertimbangkan dari jumlah banyaknya wisatawan menginap yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar pajak dari hotel yang dapat diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ketika wisatawan lebih lama menginap dan tentu akan semakin banyak berkunjung ke berbagai tempat dan membayar seperti retribusi parkir dan pajak restoran sehingga menjadikan suatu daerah mengalami perubahan ekonomi. Oleh karena itu meningkatnya wisatawan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik oleh pemilik-pemilik hotel di Sumatera Barat, sehingga meningkatkan PAD itu sendiri.

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Diantaranya Baehaqi (2016) hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil penelitian Budhiasa (2014) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan Akbary (2017) hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pada penelitian Aliandi (2013) menyatakan bahwa jumlah hotel dan akomodasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Alghifari (2018) hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah tingkat penghunian kamar berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil penelitian Wijaya (2014) menyatakan bahwa jumlah tingkat penghunian kamar hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih menumkan hasil yang kontradiktif antara satu sama lain. Dan juga pemaparan latar belakang secara singkat mengenai masing-masing variabel meliputi jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi, jumlah tingkat penghunian kamar, serta jumlah rata-rata lama menginap tamu. Adapun hal-hal tersebut yang mendasari peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan akomodasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh tingkat penghunian kamar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Barat.
2. Pengaruh jumlah hotel dan akomodasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Barat.

3. Pengaruh jumlah tingkat penghunian kamar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akamedisi

Hal ini dapat digunakan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan literatur yang membantu menambah wawasan tentang Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan atau referensi bagi para peneliti mendatang yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah diharapkan mendapat informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna dalam meningkatkan dan memajukan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.